

Judul : Marak bendera Anime, boleh ekspresi asal tidak lampau batas
Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Marak Bendera Anime

Boleh Ekspresi Asal Tidak Lampau Batas



Danang Wicaksana Sulistya

FENOMENA pengibaran bendera anime One Piece ramai diperbincangkan di media sosial dan ditemukan di berbagai daerah. Menyikapi hal ini, sejumlah anggota DPR mengimbau masyarakat tidak turut mengikuti tren yang dianggap dapat menodai nilai-nilai nasionalisme.

Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mengimbau masyarakat tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera bajak laut dari anime tersebut, khususnya menjelang perayaan kemerdekaan RI.

Menurutnya, tindakan semacam itu berpotensi mengganggu kekhidmatan peringatan hari besar nasional. Budaya populer seperti anime memang dapat menjadi hiburan, tapi penggunaannya dalam konteks nasional, khususnya saat peringatan kemerdekaan, tidaklah tepat.

"Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan semangat perjuangan kemerdekaan," ujarnya.

Danang menegaskan, peringatan kemerdekaan adalah momentum penting untuk menegenang jasa pahlawan serta memperkuat semangat persatuan dan identitas bangsa.

"Mari rayakan kemerdekaan dengan cara yang pantas. Jangan asal ikut tren, apalagi yang bisa mengganggu ketertiban atau menimbulkan

polemik di tengah masyarakat," saran politikus Gerindra tersebut.

Anggota Komisi XI DPR Anna Mu'awanah juga menyayangkan maraknya aksi pengibaran bendera One Piece. Fenomena ini memunculkan pertanyaan publik dan kekhawatiran atas pergeseran nilai-nilai kebangsaan yang semestinya dijaga dengan penuh kesadaran sejarah.

"Pengibaran bendera One Piece ini tidak secara jelas menunjukkan tujuan politik, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa simbol ini memiliki sejarah dan konotasi kurang baik di beberapa negara," ujar Anna.

Dia menyarankan masyarakat tetap mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol resmi negara dan kebanggaan nasional.

"Jika kita abai, hal seperti ini bisa mengikis kepekaan generasi muda terhadap simbol-simbol perjuangan dan jati diri bangsa," lanjut politikus PKB itu.

Anna mengingatkan bahwa ekspresi budaya populer tidak boleh melampaui batas hingga mengabaikan pijakan historis dan identitas nasional. Jangan sampai atas nama kebebasan berekspresi, kita kehilangan pijakan historis dan identitas nasional.

Anna mencontohkan budaya penghormatan yang diterapkan di lingkungan DPR, di mana setiap pukul 10.00 pagi, seluruh anggota dan pegawai berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Budaya seperti inilah yang seharusnya diperkuat dan ditekankan. Bukan justru memberi ruang pada simbol-simbol asing yang bisa menggerus semangat nasionalisme kita," ujarnya.

Anna juga mendorong agar Pemerintah melalui kementerian dan lembaga pendidikan meningkatkan literasi publik tentang simbol negara, sejarah kemerdekaan, dan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan. ■ RIF